PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2022
SEKRETARIS

YUNI RAHAYUNINGTYAS, SKM,M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700605 199501 2 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	3
B Struktur Jabatan	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	10
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12
B Rekomendasi	12

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

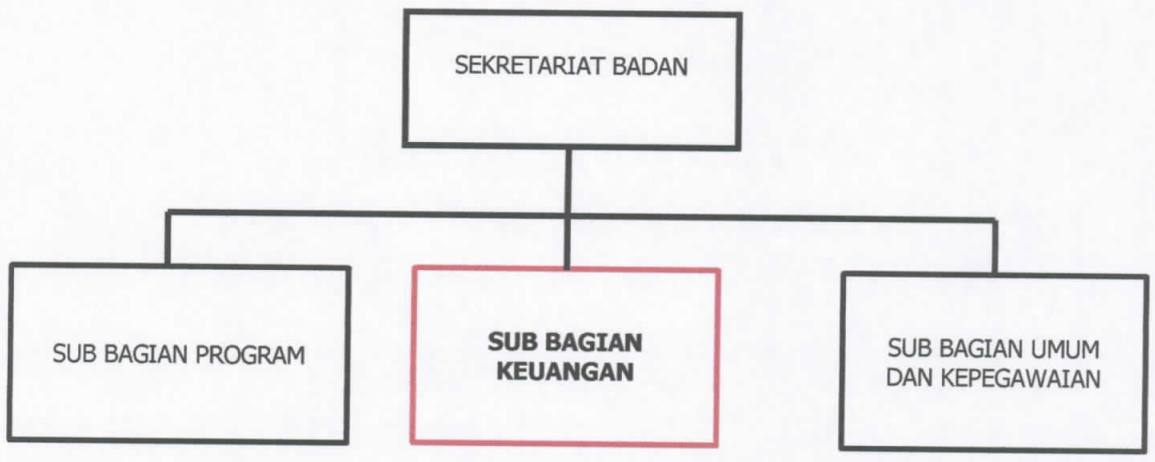
a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 Tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) **Administrasi Keuangan,** dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis).

   Adapun Sub Kegiatannya meliputi :

   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   c) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
   d) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
   e) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; dan
   f) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah *sebagaimana terlampir*.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sekretariat

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
I	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100 %	100%	0	100%	100%	100%
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan	35 Kab/Kota	35	35	0	35	100%
II	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90%	90%	90%	90%	90%	100%
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	90%	90%	90%	90%	90%	100%
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	2	1	1	1	100%
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	5 Dokumen	1	2	1	1	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD	4 Laporan	1	1	1	1	100%
3	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah kendaraan operasional	20 Unit	20	20	20	20	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya	12 Bulan	3	3	3	3	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah						
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	25 Unit	0	9	0	6	60%
		Jumlah layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah	5 Laporan	1	1	1	2	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	3	3	3	3	100%
		Jenis Pakaian Dinas Yang Diadakan	2 Jenis	0	0	0	0	0%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan dari Program dan kegiatan yang ada, capaian kinerjanya 100,00% atau **"Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bagian Keuangan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
PROGRAM : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah							
Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	4	4	100%	23.094.506.000	21.532.916.330	93,24%
JUMAH				**100%**	**23.094.506.000**	**21.532.916.330**	**93,24%**

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran *(cost per outcomes)* di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 100,00% dan capaian serapan anggaran sebesar 93,24%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bagian Keuangan adalah **"Baik"** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.561.589.670,00 atau sebesar 6,76%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dari 2 (dua) program dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan dicapai melalui 5 (lima) kegiatan pendukung rata-rata capaian kinerja 105 % atau "Sangat Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel. 2.3

Pagu Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Langsung terdiri:	29.789.960.000,00	27.993.693.860,00	93,97
1	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	450.626.000,00	440.324.866,00	97,71
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	450.626.000,00	440.324.866,00	97,71
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	29.339.334.000,00	27.553.368.994,00	93,91
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.325.000,00	86.397.500,00	94,60
2	Kegiatan Administrasi Keuangan	23.094.506.000,00	21.532.916.330,00	93,24
3	Kegiatan Administrasi Umum	6.133.503.000,00	5.931.655.164,00	96,71
4	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	2.400.000,00	12,00
			Rata-rata penyerapan anggaran	93,97

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan pada Sekretariat sebesar Rp.29.789.960.000,00

terealisasi sebesar Rp.27.993.693.860,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.796.266.140,00 atau 6,03%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Penerapan Reformasi Birokrasi di semua area perubahan secara bertahap di lingkup BPKAD.
2. Peningkatan inovasi metode kerja dan layanan secara terus menerus demi peningkatan layanan Sekretariat kepada pengguna layanan/masyarakat.
3. Peningkatan budaya kerja yang lebih berkinerja secara bertahap sebagai bentuk respon dari dinamika situasi dan regulasi serta kebutuhan organisasi yang terus berkembang dengan sumber daya yang terbatas.
4. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Sekretariat sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;
5. Peningkatan kualitas layanan yang baik pada internal badan sehingga ada peningkatan kepuasan pegawai BPKAD terhadap layanan fasilitas Sekretariat kepada Bidang-bidang dan UPAD;
6. Fasilitasi terhadap unit layanan publik yang dimiliki oleh BPKAD untuk bisa meningkatkan kepuasan masyarakat yang memanfaatkan layanan BPKAD (Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset, Asrama Haji Donohudan);
7. Optimalisasi monitoring, review dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan maupun layanan yang dilaksanakan di BPKAD
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan kabupaten/kota sebagai wujud dari peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di bidang keuangan.
9. Peningkatan layanan administrasi keuangan di tataran internal SKPD maupun SKPKD.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 105% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,97%, sehingga dapat dikategorikan **"Sangat Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp.1.796.266.140,00 atau 6,03%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen di jajaran struktural dan seluruh pegawai untuk dimulainya implementasi bertahap reformasi birokrasi.
2. Pengkajian kegiatan-kegiatan prioritas untuk dipertahankan dan dilakukan terkait dengan kebijakan refokusing dan pergeseran anggaran untuk mendukung penanganan Covid 19 tanpa mengurangi ketercapaian target indikator kinerja unit kerja.
3. Peningkatan inovasi metode dan forum kegiatan yang berkontribusi nyata dalam pencapaian target kinerja.
4. Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah (baik di lingkungan internal maupun kabupaten/kota).
5. Peningkatan mutu pelayanan unit kerja kepada pengguna layanan BPKAD (internal maupun eksternal).
6. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan dari anggaran SKPKD yang lebih akuntabel, transparan dan berkinerja.

Semarang, Februari 2022

Mengetahui KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SEKRETARIS
SLAMET, AK	YUNI RAHAYUNINGTYAS, SKM,M.Kes
Pembina Tingkat I	Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198603 1 001	NIP. 19700605 199501 2 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	11
BAB III PENUTUP	14
A Kesimpulan	14
B Rekomendasi	14
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Umum dan Kepegawaian.	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Umum dan Kepegawaian di Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Umum dan Kepegawaian di Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Rencana Strategi 2018-2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2022
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT BPKAD

SRI RIYANTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19681221 199003 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

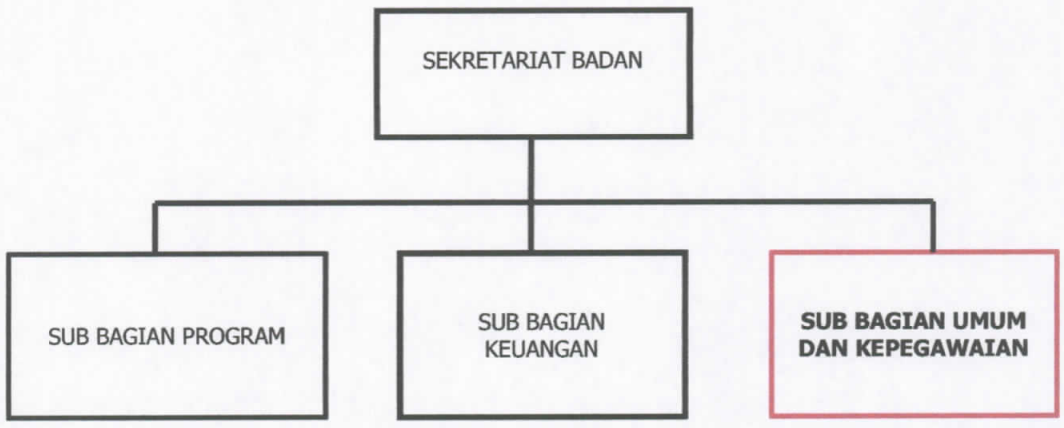
A. Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian, yang meliputi :

1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
2) menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan ketatausahan di lingkungan Badan;
3) menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Badan;
4) menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
5) menyiapkan bahan dan melakukan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
6) menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
7) menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketata laksanaan di lingkungan Badan;
8) menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Badan; dan
9) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 Tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Administrasi Umum, dengan indikator Jumlah kendaraan operasional, Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah, Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah, Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah, Jumlah layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah, Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah, Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah, umlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah, Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah, Jenis Pakaian Dinas Yang Diadakan, Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah, Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah.

Adapun Sub Kegiatannya meliputi :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e) Penyediaan Alat Tulis Kanto;
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
i) Penyediaan Makanan dan Minuman;
j) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
k) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
l) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
n) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
o) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
p) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; dan
q) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

2) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kinerja Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/ Seminar. Adapun Sub kegiatannya adalah:
a) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah *sebagaimana terlampir*.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	PROGRAM : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah							
	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah kendaraan operasional	20	20	20	20	20	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	25	0	9	0	6	60%
		Jumlah layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah	5	1	1	1	2	100%

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jenis Pakaian Dinas Yang Diadakan	2	0	0	0	0	0%

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	2	0	0	0	2	100%
		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	1	1	1	2	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/ Seminar	50	25	25	25	0	150%
	Rata-rata (Average)							**110%**

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dari Program dan kegiatan yang ada, capaian kinerjanya 110,00% atau **"Sangat Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
PROGRAM : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah							
Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah kendaraan operasional	20	20	100%	0	0	0
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	12	100%	484.000.000	470.147.300	97,14%
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	12	100%	567.400.000	564.652.422	99,52
	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	25	15	60%	1.309.101.000	1.240.530.600	94,76
	Jumlah layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah	5	5	100%	0	0	0

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12	12	100%	18.100.000	17.399.500	96,13
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	12	100%	175.000.000	163.314.057	93,32
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	100%	646.376.000	645.866.875	99,92
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	12	100%	2.000.000	1.080.000	54,00
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	12	100%	326.500.000	326.364.692	99,96
	Jenis Pakaian Dinas Yang Diadakan	2	0	0%	0	0	0
	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	2	2	100%	100.000.000	99.957.780	99,96
	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	5	100%	0	0	0
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa	12	12	100%	272.600.000	269.923.184	99,02

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/ Bintek/Seminar	50	75	150%	20.000.000	2.400.000	12,00
JUMAH				**94,00%**	**3.921.077.000**	**3.801.636.410**	**96,95**

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran *(cost per outcomes)* di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebesar 94,00% dan capaian serapan anggaran sebesar 96,95%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah "**Sangat Bail**" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.119.440.590,00 atau sebesar 3,05%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kebijakan kepegawaian dan evaluasi kepegawaian unit kerja setiap tahun.
2) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan internal terkait administrasi kepegawaian pada masing-masing unit kerja;
3) Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan kepegawaian pada lingkup unit kerja; dan
4) Melakukan pembinaan pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 110,00% dan anggaran sebesar 96,95%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.119.440.590,00 atau sebesar 3,05%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi sub kegiatan, kegiatan agar selaras dan relevan dengan program serta tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi sehingga kinerja setiap lini baik pelaksana, pengawas dan administrator dapat terpantau dan supervisi dapat dilakukan secara tepat guna mencapai target kinerja organisasi.
3. Optimalisasi sistem kepegawaian dalam upaya peningkatan layanan kepegawaian pada unit kerja.
4. Mengimplementasikan kebijakan *punishment* dan *reward* di setiap lini guna meningkatkan kinerja pegawai.

Semarang,

Mengetahui SEKRETARIS BPKAD	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
YUNI RAHAYUNINGTYAS, SKM, M.Kes	SRI RIYANTO, S.Sos.
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19700605 199501 2 001	NIP. 19681221 199003 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Keuangan di Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Keuangan di Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Rencana Strategi 2018-2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2022
KEPALA SUB KEUANGAN
SEKRETARIAT BPKAD

SANADI, SE, M.Ak
Penata Tingkat I
NIP. 19790927 200003 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bagian Keuangan Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan, yang meliputi :

1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
2) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
3) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan pembukuan;
4) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
5) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
6) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bagian Program pada Sekretariat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 Tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) **Administrasi Umum,** dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis).

   Adapun Sub Kegiatannya meliputi :

   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   c) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
   d) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
   e) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; dan
   f) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah *sebagaimana terlampir.*

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Keuangan.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	PROGRAM : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah							
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	4	1	1	1	1	100%
							Rata-rata (Average)	**100%**

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Keuangan dari Program dan kegiatan yang ada, capaian kinerjanya 100,00% atau **"Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bagian Keuangan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
PROGRAM : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah							
Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	4	4	100%	23.094.506.000	21.532.916.330	93,24%
JUMAH				**100%**	**23.094.506.000**	**21.532.916.330**	**93,24%**

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran *(cost per outcomes)* di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 100,00% dan capaian serapan anggaran sebesar 93,24%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bagian Keuangan adalah **"Baik"** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.561.589.670,00 atau sebesar 6,76%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kebijakan keuangan dan evaluasi penyerapan anggaran pada unit kerja setiap tahun.
2) Melaksanakan pengendalian internal terkait administrasi keuangan pada masing-masing unit kerja;
3) Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan keuangan pada lingkup unit kerja; dan
4) Melakukan pembinaan dan pengusulan peningkatan kapasitas khususnya perbendaharaan pada para pelaksana guna peningkatan kinerja secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100,00% dan anggaran sebesar 93,24%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.561.589.670,00 atau sebesar 6,76%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan Sekretariat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi sub kegiatan, kegiatan agar selaras dan relevan dengan program serta tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi sehingga kinerja setiap lini baik pelaksana, pengawas dan administrator dapat terpantau dan supervisi dapat dilakukan secara tepat guna mencapai target kinerja organisasi.
3. Optimalisasi penatausahaan keuangan dalam upaya peningkatan layanan administrasi keuangan pada unit kerja dan perangkat daerah lainnya.
4. Peningkatan sumber daya aparatur pada bidang keuangan (perbendaharaan) melalui diklat/bintek/*workshop* dan seminar.

Semarang, Februari 2022

Mengetahui SEKRETARIS BPKAD	KEPALA BAGIAN KEUANGAN
YUNI RAHAYUNINGTYAS, SKM, M.Kes	SANADI, SE, M.Ak
Pembina Tingkat I	Penata Tingkat I
NIP. 19700605 199501 2 001	NIP. 19790927 200003 1 005 1 005

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
BAB I PENDAHULUAN		3
A	Tugas Jabatan	3
B	Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN		5
A	Perjanjian Kinerja	5
B	Capaian Kinerja	5
C	Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	8
BAB III PENUTUP		10
A	Kesimpulan	10
B	Rekomendasi	10

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Program.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Program di Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Program di Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Rencana Strategi 2018-2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2022
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
SEKRETARIAT BPKAD

OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19851010 200312 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

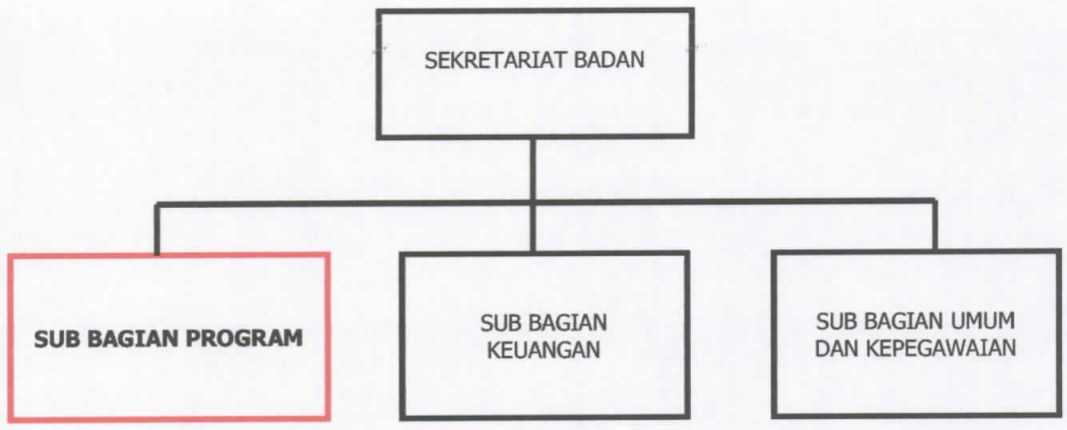
A. Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bagian Program Sekretariat mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, yang meliputi :

1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
2) Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
3) Menyiapkan bahan pengendalian program dan Kegiatan;
4) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
5) Menyiapkan bahan evaluasi RAPBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
6) Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
7) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bagian Program pada Sekretariat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 Tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Dan Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
   Adapun Sub Kegiatannya meliputi :
   a) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
   b) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
   c) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
   d) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah; dan
   e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan.
   Adapun Sub kegiatannya meliputi :
   a) Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
   b) Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
   c) Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; dan
   d) Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah *sebagaimana terlampir.*

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Bagian Program pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Program.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	PROGRAM : Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah							
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5	2	1	1	1	100%
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	1	2	1	1	100%
	PROGRAM : Program Pengelolaan Keuangan Daerah							
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan.	105	35	35	0	35	100%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Program dari Program dan kegiatan yang ada, capaian kinerjanya 100% atau **"Baik"**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bagian Program, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Kegiatan 1.1** Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5	5	100%	55.971.000	51.137.000	91,36%
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	5	100%	35.354.000	35.260.500	99,74%
Program : Pengelolaan Keuangan Daerah **Kegiatan 2.1** Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan.	105	105	100%	450.626.000	440.324.866	97,71%
URAIAN				100%	541.951.000	526.722.366	97,19

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran *(cost per outcomes)* di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian

kinerja Kepala Sub Bagian Program sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 97,19%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bagian Program adalah **"baik"** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.15.228.634,00 atau sebesar 2,81%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja unit kerja setiap tahun.
2) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terkait tahapan penyusunan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; dan
3) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100,00% dan anggaran sebesar 97,19%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.15.228.634,00 atau sebesar 2,81%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program Sekretariat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi sub kegiatan, kegiatan agar selaras dan relevan dengan program serta tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi sehingga kinerja setiap lini baik pelaksana, pengawas dan administrator dapat terpantau dan supervisi dapat dilakukan secara tepat guna mencapai target kinerja organisasi.
3. Adanya forum antar daerah guna menyelesaikan permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan di daerah.

Semarang,

Mengetahui SEKRETARIS BPKAD	KEPALA BAGIAN PROGRAM
YUNI RAHAYUNINGTYAS, SKM, M.Kes	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, MM
Pembina Tingkat I	Penata Tingkat I
NIP. 19700605 199501 2 001	NIP. 10851010 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan rahmat Allah SWT selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), seluruh program dan kegiatan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu cara dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong peningkatan pelayanan publik serta mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). LKj sekaligus sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dan bertekad untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa tepat guna dan tepat sasaran.

Laporan ini juga disusun untuk menjelaskan tentang kinerja yang telah dilaksanakan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam lingkup penyusunan anggaran serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, yang dijabarkan dalam Rencana Strategi 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang,
KEPALA BIDANG ANGGARAN

DWIANTO PRIYONUGROHO, M. Prof. Ac
Pembina
NIP. 19801221 200604 1 010

FORMAT LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	3
B Struktur Jabatan	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Anggaran	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan, Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan;
b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

Susunan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

a. Subbidang Anggaran Bidang Pemerintahan;
b. Subbidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
c. Subbidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal dengan sasaran Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai Kaidah Perundangan yang didukung oleh program dan kegiatan sebagai:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan, Indikator dan Target

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%
2.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	16 OPD
		Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	13 OPD
		Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	14 OPD

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Bidang Anggaran

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
I	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Presentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100 %	100%	0	100%	100%	100%
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	16 OPD	0	16	16	16	100%
		Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	13 OPD	0	13	13	13	100%
		Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	14 OPD	0	14	14	14	100%
							% capaian	**100%**

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa rata-rata capaian kinerja Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah 100 % atau "Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Langsung terdiri:	5.711.188.000,00	5.623.740.200,00	98,47
1	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	5.711.188.000,00	5.623.740.200,00	98,47
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.711.188.000,00	5.623.740.200,00	98,47
		Rata-rata penyerapan anggaran		**98,47**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.5.711.188.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.623.740.200,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.87.447.800,00 atau 1,53%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi, upaya, serta inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi lintas bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja unit kerja setiap tahun.

2. Koordinasi antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara masif serta menjalin komunikasi yang baik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait tahapan penyusunan APBD lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pembinaan penyusunan APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Tahun 2022; dan
4. Melakukan pengendalian internal kepada pribadi maupun pada jajaran dibawahnya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,47%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.87.447.800,00 atau 1,53%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu menjaga dan meningkatkan kinerja yang telah tercapai di tahun 2021;
2. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar tercapai *output* dan *outcome* sesuai dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah tertuang pada Renja, Renstra dan RKPD serta persiapan mencapai target dalam RPJMD 2018 - 2023.
3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang,

Mengetahui KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA BIDANG ANGGARAN
SLAMET, AK Pembina Tingkat I NIP. 19660215 198603 1 001	DWIANTO PRIYONUGRUHO, M.Prof.Ac Pembina NIP. 19801221 200604 1001

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan rahmat Allah SWT selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), seluruh kegiatan Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu cara dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong peningkatan pelayanan publik serta mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). LKj sekaligus sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dan bertekad untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang tepat guna dan tepat sasaran.

Laporan ini juga disusun untuk menjelaskan tentang kinerja yang telah dilaksanakan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam lingkup penyusunan anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan, BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, yang dijabarkan dalam Rencana Strategi 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang,
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
BIDANG ANGGARAN BPKAD

MEITRI YUSWARDHANU SURYAHADI, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19760518 200501 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	6
B Capaian Kinerja	6
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	9
BAB III PENUTUP	11
A Kesimpulan	11
B Rekomendasi	11
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan.	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

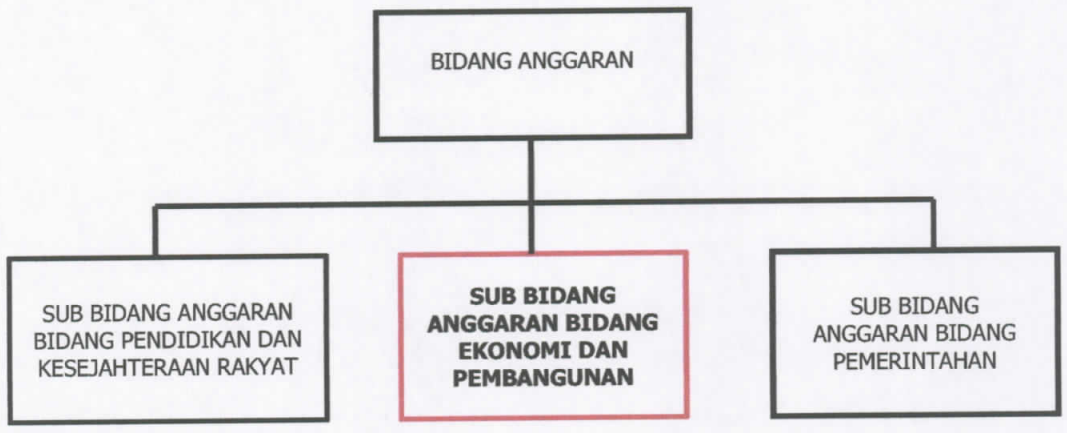
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis,pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, yang meliputi :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
2) Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3) Menyiapkan bahan penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
4) Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5) Menyiapkan bahan pembahasan dan penelitian Rencana Kegiatan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
6) Menyiapkan bahan penyusunan Nota Keuangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
7) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

8) Menyiapkan bahan pembahasan dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dalam hal belanja Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
9) Menyiapkan bahan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
10) Menyiapkan bahan penerbitan surat penyediaan dana sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan kredit anggaran belanja Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
11) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
12) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Bidang Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 Tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan yang didukung melalui sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
2. Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD; dan
3. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	13 OPD	0	13	13	13	100%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan dari kegiatan yang ada adalah 100% atau **"Baik".**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pagu Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2021

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	13	13	100%	2.414.360.000	2.385.536.500	98,81%
				100%	**2.414.360.000**	**2.385.536.500**	**98,81%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.2.414.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.385.536.500,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.28.823.500,00 atau 1,19%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah "**baik**".

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja unit kerja setiap tahun.
2) Koordinasi antar SKPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan secara masif serta menjalin komunikasi yang baik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota;
3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait tahapan penyusunan APBD lingkup SKPD bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta pembinaan penyusunan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah di Tahun 2022; dan
4) Melakukan pengendalian internal kepada pribadi maupun pada jajaran dibawahnya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan keuangan sebesar 98,81%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.28.823.500,00 atau sebesar 1,19%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Bidang Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu menjaga dan meningkatkan kinerja yang telah tercapai di tahun 2021;
2. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar tercapai *output* dan *outcome* sesuai dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah tertuang pada Renja, Renstra dan RKPD serta persiapan mencapai target dalam RPJMD 2018 - 2023.
3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang,

Mengetahui KEPALA BIDANG ANGGARAN	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. AC Pembina NIP. 19801221 200604 1 010	MEITRI YUSWARDHANU SURYAHADI, ST Pembina NIP. 10760518 200501 1 011

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan rahmat Allah SWT selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), seluruh kegiatan Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan Tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu cara dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong peningkatan pelayanan publik serta mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). LKj sekaligus sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dan bertekad untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa tepat guna dan tepat sasaran.

Laporan ini juga disusun untuk menjelaskan tentang kinerja yang telah dilaksanakan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam lingkup penyusunan anggaran bidang pemerintahan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan, BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, yang dijabarkan dalam Rencana Strategi 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang,
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG
PEMERINTAHAN BPKAD

LAKSONO DEWANTO, S.E.,M.M.
Pembina
NIP. 19820621 200812 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	6
A Perjanjian Kinerja	6
B Capaian Kinerja	6
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	9
BAB III PENUTUP	11
A Kesimpulan	11
B Rekomendasi	11
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan.	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan, antara lain sebagai berikut :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan;
2) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan;
3) Menyiapkan bahan penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan;
4) Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan;
5) Menyiapkan bahan pembahasan dan penelitian Rencana Kegiatan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pemerintahan;
6) Menyiapkan bahan penyusunan Nota Keuangan Bidang Pemerintahan;
7) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja Bidang Pemerintahan;

8) Menyiapkan bahan pembahasan dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dalam hal belanja Bidang Pemerintahan;
9) Menyiapkan bahan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan;
10) Menyiapkan bahan penerbitan surat penyediaan dana sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan kredit anggaran belanja Bidang Pemerintahan;
11) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan;
12) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan; dan
13) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 Tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan yang didukung melalui sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
2. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran;
3. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah; dan
4. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	16 OPD	0	16	16	16	100%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan dari kegiatan yang ada adalah 100% atau **"Baik".**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pagu Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2021

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	16	16	100%	1.015.770.000	983.175.900	96,79%
				100%	**1.015.770.000**	**983.175.900**	**96,79%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.015.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.983.175.900,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.32.594.100,00 atau 3,21%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan adalah "**baik**".

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi, upaya, serta inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja unit kerja setiap tahun.

2) Koordinasi antar SKPD lingkup bidang Pemerintahan secara masif serta menjalin komunikasi yang baik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota;
3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait tahapan penyusunan APBD lingkup SKPD bidang Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah serta pembinaan penyusunan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah di Tahun 2022; dan
4) Melakukan pengendalian internal kepada pribadi maupun pada jajaran dibawahnya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan keuangan sebesar 96,79%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.32.594.100,00 atau sebesar 3,21%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu menjaga dan meningkatkan kinerja yang telah tercapai di tahun 2021;
2. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar tercapai *output* dan *outcome* sesuai dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah tertuang pada Renja, Renstra dan RKPD serta persiapan mencapai target dalam RPJMD 2018 - 2023.
3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang,

Mengetahui KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN
DWIANTO PRIYONUGRUHO, M.Prof.Ac Pembina NIP. 19801221 200604 1001	LAKSONO DEWANTO, S.E.,M.M. Pembina NIP. 19820621 200812 1 001

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan rahmat Allah SWT selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), seluruh kegiatan Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra Tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu cara dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong peningkatan pelayanan publik serta mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). LKj sekaligus sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dan bertekad untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa tepat guna dan tepat sasaran.

Laporan ini juga disusun untuk menjelaskan tentang kinerja yang telah dilaksanakan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam lingkup penyusunan anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, yang dijabarkan dalam Rencana Strategi 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang,
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG
PENDIDIKAN DAN KESRA BPKAD

MUSTAQIM, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19690708 199003 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	6
A Perjanjian Kinerja	6
B Capaian Kinerja	6
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	9
BAB III PENUTUP	11
A Kesimpulan	11
B Rekomendasi	11
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra.	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

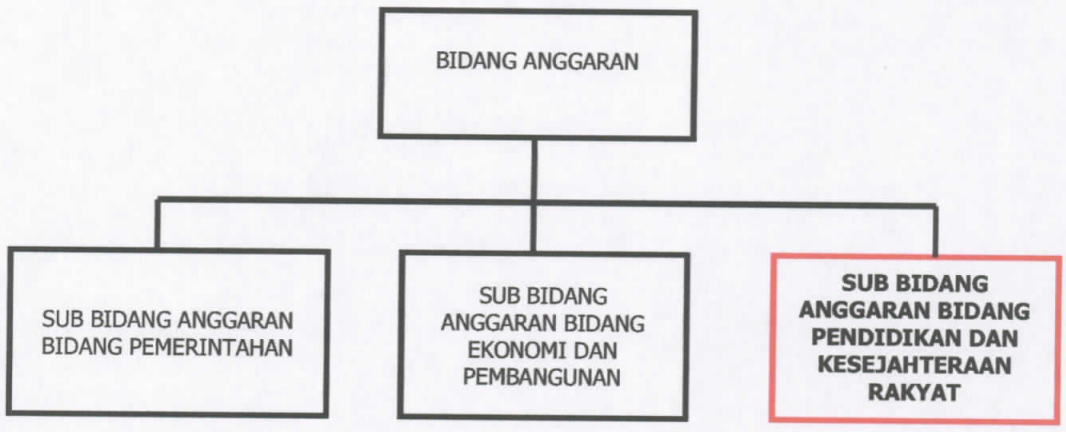
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra, antara lain sebagai berikut :

1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
2) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang anggaran bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
3) menyiapkan bahan penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
4) menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
5) menyiapkan bahan pembahasan dan penelitian rencana kegiatan anggaran / dokumen pelaksanaan anggaran bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
6) menyiapkan bahan penyusunan nota keuangan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;

7) menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
8) menyiapkan bahan pembahasan dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dalam hal belanja Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
9) menyiapkan bahan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
10) menyiapkan bahan penerbitan surat penyediaan dana sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan kredit anggaran belanja Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
11) menyiapkan bahan evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
12) menyiapkan bahan pembinaan penyusunan anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
13) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Anggaran, Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
14) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 Tahun 2016

BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan yang didukung melalui sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan KUA dan PPAS; dan
2. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	14 OPD	0	14	14	14	100%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra dari kegiatan yang ada adalah 100% atau **"Baik".**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pagu Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2021

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	14	14	100%	2.281.058.000	2.255.027.800	98,86%
				100%	**2.281.058.000**	**2.255.027.800**	**98,86%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.2.281.058.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.255.027.800,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.26.030.200,00 atau 1,14%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra adalah **"baik"**.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi, upaya, serta inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja unit kerja setiap tahun.

2) Koordinasi antar SKPD lingkup Bidang Pendidikan dan Kesra secara masif serta menjalin komunikasi yang baik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota;
3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait tahapan penyusunan APBD lingkup SKPD Bidang Pendidikan dan Kesra Provinsi Jawa Tengah serta pembinaan penyusunan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah di Tahun 2022 ; dan
4) Melakukan pengendalian internal kepada pribadi maupun pada jajaran dibawahnya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan keuangan sebesar 98,86%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.26.030.200,00 atau 1,14%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu menjaga dan meningkatkan kinerja yang telah tercapai di tahun 2021;
2. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar tercapai *output* dan *outcome* sesuai dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah tertuang pada Renja, Renstra dan RKPD serta persiapan mencapai target dalam RPJMD 2018 - 2023.
3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang,

Mengetahui	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN
KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD	BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA
DWIANTO PRIYONUGRUHO, M.Prof.Ac	MUSTAQIM, S.E., M.M.
Pembina	Pembina
NIP. 19801221 200604 1001	NIP. 19690708 199003 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

SLAMET, AK
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660215 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A Perjanjian Kinerja	7
B Capaian Kinerja	8
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	10
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12
B Rekomendasi	12
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Bidang Akuntansi
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

Susunan Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

a. Subbidang Akuntansi Pemerintahan;
b. Subbidang Akuntansi Ekonomi dan Pembangunan; dan
c. Subbidang Akuntansi Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
   b) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
2) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda;
   b) Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan; dan
   c) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

3) Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :

a) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota;
b) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
c) Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Bidang Akuntansi

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
							% capaian	**100,00%**
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	13	13	13	13	13	100,00%
		Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	14	14	14	14	14	100,00%
		Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	14	14	14	14	14	100,00%
							% capaian	**100,00%**

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa rata-rata capaian kinerja Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dari 1 (satu) program: Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan pendukungnya adalah 100,00% atau "Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	3.120.643.000	3.050.967.600	97,77%
				100%	**3.120.643.000**	**3.050.967.600**	**97,77%**
Kegiatan 1.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	13	13	100%	1.062.788.000	1.036.703.750	97,55%
	Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	14	14	100%	676.289.000	656.591.950	97,09%
	Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai	14	14	100%	1.381.566.000	1.357.671.900	98,27%

	kaidah perundangan						
				100%	**3.120.643.000**	**3.050.967.600**	**97,77%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.3.120.643.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.050.967.600,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.69.675.400,00 atau 2,23%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Bidang Akuntansi sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar terutama dalam hal pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD secara rutin setiap bulan dan juga Laporan Keuangan SKPD setiap tahun;
3. Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada SPKD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota;
4. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari program tercapai 100,00% dan indikator kinerja dari kegiatan tercapai 100,00%. Sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 97,77%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.69.675.400,00 atau 2,23%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan/Sub Kegiatan agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan konsolidasi data statistik laporan keuangan daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian".
3. Melakukan perluasan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan kabupaten/Kota.

Semarang,

Mengetahui KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA BIDANG AKUNTANSI
SLAMET, Ak Pembina Tingkat I NIP. 19660215 198603 1 001	SLAMET, AK Pembina Tingkat I NIP. 19660215 198603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA

NURRAHMAN ADI PUTRA, SE Akt
Penata (III/c)
NIP. 19860625 201101 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	8
A Perjanjian Kinerja	8
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	11
BAB III PENUTUP	13
A Kesimpulan	13
B Rekomendasi	13
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Akuntansi di bidang Pendidikan dan Kesra.

Adapun tugas Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra meliputi:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesra;
b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesra;
c. menyiapkan bahan petunjuk teknis percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
d. menyiapkan bahan petunjuk teknis Pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
e. menyiapkan bahan pembinaan penatausahaan keuangan Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
f. menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
g. menyiapkan bahan pengendalian realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
h. menyiapkan bahan verifikasi dan pengujian laporan pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
i. menyiapkan bahan rekonsiliasi antara bagian akuntansi dengan bendahara Perangkat Daerah setiap semester dan rekonsiliasi antara penyusun laporan keuangan Perangkat Daerah dan pengurus barang dengan bagian akuntansi setiap semester Bidang Pendidikan dan Kesra;

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik Bidang Pendidikan dan Kesra;
k. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
l. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
m. menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
n. menyiapkan bahan penyusunan bahan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
o. menyiapkan bahan penyusunan bahan audit terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesra;
p. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setelah hasil audit Bidang Pendidikan dan Kesra;
q. menyiapkan bahan pengendalian, pemeliharaan dan pemutakhiran data sistem informasi keuangan daerah khususnya modul akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesra;
r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesra; dan
s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. **Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal

meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota;
   b) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan;
   c) Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

B. **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Bidang Akuntansi

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	14	14	14	14	14	100,00%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan indikator rata-rata capaian kinerjanya adalah 100,00% atau "Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	14	14	100%	1.381.566.000	1.357.671.900	98,27%
				100%	**1.381.566.000**	**1.357.671.900**	**98,27%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) indikator kegiatan pada Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.381.566.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.357.671.900,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.23.894.100,00 atau 1,73%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pendidikan dan Kesra sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar terutama dalam hal pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD secara rutin setiap bulan dan juga Laporan Keuangan SKPD setiap tahun; dan
3. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari kegiatan tercapai 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,27%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.23.894.100,00 atau 1,73%.

B. **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan/Sub Kegiatan agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar terutama dalam hal pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD secara rutin setiap bulan dan juga Laporan Keuangan SKPD setiap tahun.
3. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

Semarang,

Mengetahui

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

SLAMET, Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198603 1 001

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA

NURRAHMAN ADI PUTRA, SE Akt
Penata
NIP. 19860625 201101 1 014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

NGASIRAN, SE,Akt, M.Ak
Penata (III/c)
NIP. 19800405 201101 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	8
A Perjanjian Kinerja	8
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	11
BAB III PENUTUP	13
A Kesimpulan	13
B Rekomendasi	13

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Akuntansi di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Adapun tugas Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan meliputi:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. menyiapkan bahan petunjuk teknis percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
d. menyiapkan bahan petunjuk teknis Pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
e. menyiapkan bahan pembinaan penatausahaan keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
f. menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
g. menyiapkan bahan pengendalian realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
h. menyiapkan bahan verifikasi dan pengujian laporan pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
i. menyiapkan bahan rekonsiliasi antara bagian akuntansi dengan bendahara Perangkat Daerah setiap semester dan rekonsiliasi antara penyusun

laporan keuangan Perangkat Daerah dan pengurus barang dengan bagian akuntansi setiap semester Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
k. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
l. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
m. menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
n. menyiapkan bahan penyusunan bahan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
o. menyiapkan bahan penyusunan bahan audit terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
p. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setelah hasil audit Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
q. menyiapkan bahan pengendalian, pemeliharaan dan pemutakhiran data sistem informasi keuangan daerah khususnya modul akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. **Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda;
   b) Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan; dan
   c) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

B. **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Bidang Akuntansi

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	14	14	14	14	14	100,00%

Dari tabel 2. tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan indikator rata-rata capaian kinerjanya adalah 100,00% atau "Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	14	14	100%	676.289.000	656.591.950	97,09%
				100%	**676.289.000**	**656.591.950**	**97,09%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) indikator kegiatan pada Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.676.289.000,00 terealisasi sebesar Rp.656.591.950,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.19.697.050,00 atau 2,91%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar terutama dalam hal pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD secara rutin setiap bulan dan juga Laporan Keuangan SKPD setiap tahun; dan
3. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari kegiatan tercapai 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,09%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.19.697.050,00 atau 2,91%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan BPKAD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan/Sub Kegiatan agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar terutama dalam hal pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD secara rutin setiap bulan dan juga Laporan Keuangan SKPD setiap tahun.
3. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

Semarang,

Mengetahui

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

SLAMET, Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198603 1 001

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN

NGASIRAN, SE,Akt, M.Ak
Penata
NIP. 19800405 201101 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BIDANG PEMERINTAHAN

BAYU WARDANI, SE MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19650622 198603 2 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	8
A Perjanjian Kinerja	8
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	11
BAB III PENUTUP	13
A Kesimpulan	13
B Rekomendasi	13

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Akuntansi di bidang Pemerintahan.

Adapun tugas Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan meliputi:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan;
b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan;
c. menyiapkan bahan petunjuk teknis percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan;
d. menyiapkan bahan petunjuk teknis Pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan;
e. menyiapkan bahan pembinaan penatausahaan keuangan Daerah Bidang Pemerintahan;
f. menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan;
g. menyiapkan bahan pengendalian realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
h. menyiapkan bahan verifikasi dan pengujian laporan pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
i. menyiapkan bahan rekonsiliasi antara bagian akuntansi dengan bendahara Perangkat Daerah setiap semester dan rekonsiliasi antara penyusun laporan keuang an Perangkat Daerah dan pengurus barang dengan bagian akuntansi setiap semester Bidang Pemerintahan;

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik Bidang Pemerintahan;
k. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan;
l. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan;
m. menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Bidang Pemerintahan;
n. menyiapkan bahan penyusunan bahan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan;
o. menyiapkan bahan penyusunan bahan audit terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan;
p. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setelah hasil audit Bidang Pemerintahan;
q. menyiapkan bahan pengendalian, pemeliharaan dan pemutakhiran data sistem informasi keuangan daerah khususnya modul akuntansi Bidang Pemerintahan;
r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan; dan
s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. **Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
   b) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi.

B. **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Bidang Akuntansi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	13	13	13	13	13	100,00%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan indikator rata-rata capaian kinerjanya adalah 100,00% atau "Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	13	13	100%	1.062.788.000	1.036.703.750	97,55%
				100%	**1.062.788.000**	**1.036.703.750**	**97,55%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) indikator kegiatan pada Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.062.788.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.036.703.750,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.26.084.250,00 atau 2,45%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan sehingga lebih optimal untuk

dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;

2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar terutama dalam hal pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD secara rutin setiap bulan dan juga Laporan Keuangan SKPD setiap tahun.
3. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari kegiatan tercapai 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,55%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.26.084.250,00 atau 2,45%.

B. **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Pemerintahan BPKAD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan/Sub Kegiatan agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar terutama dalam hal pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD secara rutin setiap bulan dan juga Laporan Keuangan SKPD setiap tahun.
3. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

Semarang,

Mengetahui	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
KEPALA BIDANG AKUNTANSI	BIDANG PEMERINTAHAN
SLAMET, Ak	BAYU WARDANI, SE MM
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19660215 198603 1 001	NIP. 19650622 198603 2 016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Perbendaharaan dan Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen pengelolaan keuangan atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KASDA
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

RUDI NUGROHO, SE, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197005241996031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	7
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Perbendaharaan dan Kasda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Sub Bidang Pengelolaan Kasda.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan dan Kasda menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pengoordinasian, dan Pelaksanaan Tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perbendaharaan, bidang pemerintahan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang bidang perbendaharaan, bidang pemerintahan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di pengelolaan kas daerah; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Bidang Perbendaharaan dan Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Bidang Perbendaharaan dan Kasda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

Susunan Organisasi Bidang Perbendaharaan dan Kasda terdiri atas :

a. Subbidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra;
b. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
c. Subbidang Kasda.

Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal dengan sasaran Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Serapan APBD

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D;
2. Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D; dan
3. Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Perbendaharaan dan Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Bidang Perbendaharaan dan Kasda

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
I	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase realisasi serapan APBD	92%	4,33	38,52	56,26	94,28	102,48
1	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D	100%	22	22	22	22	100%
		Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D	100 %	19	19	19	19	100%
		Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan	100%	41	41	41	41	100%
							Rata-rata capaian	**102,48**

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda dari 1 (satu) program dengan indikator Persentase realisasi serapan APBD dicapai melalui 1 (satu) kegiatan dengan indikator jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D, jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D dan jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan rata-rata capaian kinerjanya 102,48% atau "Sangat Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Perbendaharaan dan Kasda, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel. 2.3

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	%
I	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	1.172.873.000,00	1.094.551.339,00	93,32
1	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.172.873.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.094.551.339,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 78.321.661,00 atau 6,68%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan program pengelolaan keuangan daerah setiap tahun.
2. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 93,32%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp. 78.321.661,00 atau 6,68%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kasda tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
2. Evaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yang ada, sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.

Semarang,

Mengetahui KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KASDA
SLAMET, AK	RUDI NUGROHO, SE, MM
Pembina Tingkat I	Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198603 1 001	NIP. 19700524 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Stratejik 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang,
SUB KOORDINATOR BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN

BUDI SUPRIHONO, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690505 198903 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknisdi bidang pembinaan, yang meliputi :

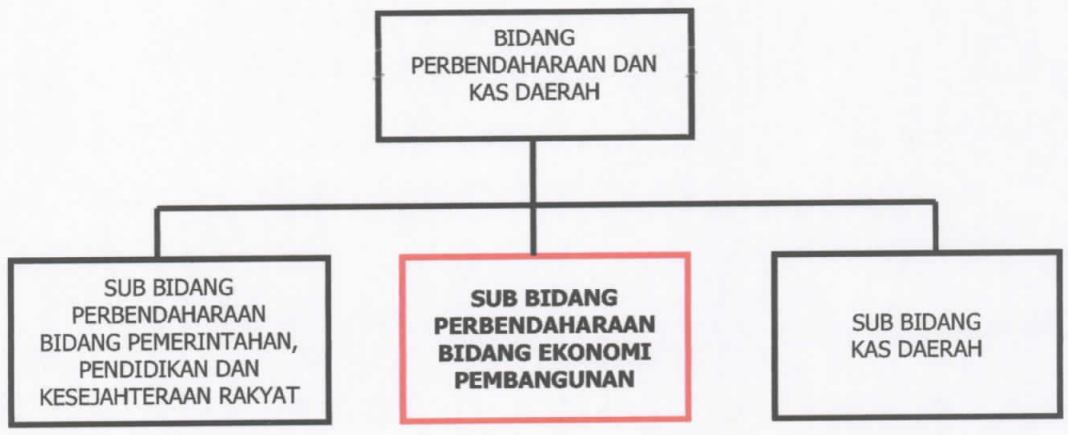
1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
2) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3) menyiapkan bahan verifikasi penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban belanja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
4) menyiapkan bahan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5) menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah (SP3B BLUD) Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
6) menyiapkan bahan penyusunan register penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
7) menyiapkan bahan evaluasi pengendalian pencairan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Perangkat Daerah dalam rangka

pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

8) menyiapkan bahan rekonsiliasi iuran wajib pegawai, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan dan iuran Tabungan Perumahan dengan pihak ketiga yang terkait Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
9) menyiapkan bahan verifikasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), belanja pegawai ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
10) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
11) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 Tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal

meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D.

   Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan:

   a) Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
   b) Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D; dan
   c) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatusahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ).

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D.	19 OPD	19	19	19	19	100%

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan dari 1 (satu) Kegiatan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan indikator rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **"Baik".**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D.	19 OPD	19 OPD	100%	359.830.000	307.193.459	85,37%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran *(cost per outcomes)* di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 85,37%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan adalah **"baik"** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.52.636.541,00 atau sebesar 14,63%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penatausahaan keuangan.
2) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan setiap tahun.
3) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 85,37 %, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.52.636.541,00 atau sebesar 14,63%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Pembangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

Semarang,

Mengetahui, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	SUB KOORDINATOR BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN
RUDI NUGROHO, SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19700524 199603 1 003	BUDI SUPRIHONO, SE, MSi Pembina NIP. 19690505 198903 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Stratejik 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang,
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA

DYAH KUSUMANINGAYU, SE.AKT,MM.
Penata (III/c)
NIP. 19800127 201101 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembinaan, yang meliputi :

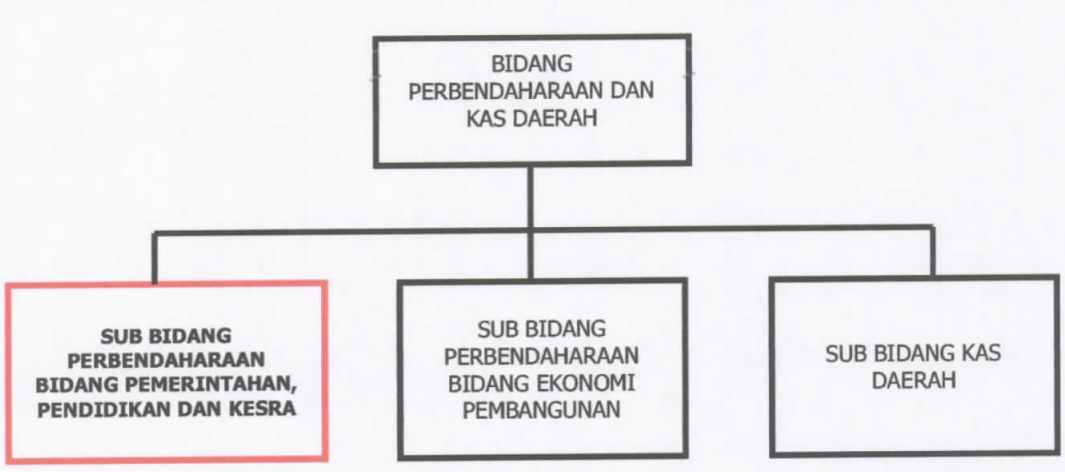
1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra;
2) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
3) menyiapkan bahan verifikasi penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban belanja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra;
4) menyiapkan bahan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
5) menyiapkan bahan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah (SP2B BLUD) Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
6) menyiapkan bahan penyusunan register penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
7) menyiapkan bahan evaluasi pengendalian pencairan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Perangkat Daerah dalam rangka

pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;

8) menyiapkan bahan rekonsiliasi iuran wajib pegawai, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan kesehatan dengan pihak BPJS Kesehatan dan TASPEN terkait Potongan Fihak Ketiga;
9) menyiapkan bahan verifikasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
10) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra; dan
11) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D.

   Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan:

   a) Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
   b) Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP; dan
   c) Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D	22 OPD	22	22	22	22	100%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat dari 1 (satu) Kegiatan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **"Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D	22 OPD	22 OPD	100%	253.276.000	234.814.880	92,71%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran *(cost per outcomes)* di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 92,71%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra adalah "**baik**" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.18.461.120,00 atau sebesar 7,29%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan setiap tahun.
2) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 92,71%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.18.461.120,00 atau sebesar 7,29%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

Semarang,

Mengetahui KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	SUB KOORDINATOR BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
RUDI MUGROHO, SE,MM	DYAH KUSUMANINGAYU,SE.AKT, MM
Pembina Tingkat I	Penata
NIP. 19700524 199603 1 003	NIP. 19800127 201101 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Stratejik 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang,
KEPALA SUB BIDANG
PENGELOLAAN KAS DAERAH

SRI SULASTRI, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19700519 199503 2002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengk oordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Kas Daerah :

1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
2) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
3) menyiapkan bahan pengelolaan administrasi pemotongan dan penyetoran pajak pihak ketiga;
4) menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Pemerintah yang telah ditunjuk;
5) menyiapkan bahan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6) menyiapkan bahan rekonsiliasi arus kas dan operasional secara periodik ;
7) menyiapkan bahan verifikasi dan evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas;
8) menyiapkan bahan bahan dan pengelolaan /penatausahaan investasi;
9) menyiapkan bahan pembayaran berdasarkan permintaan penggunaan atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
10) menyiapkan bahan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

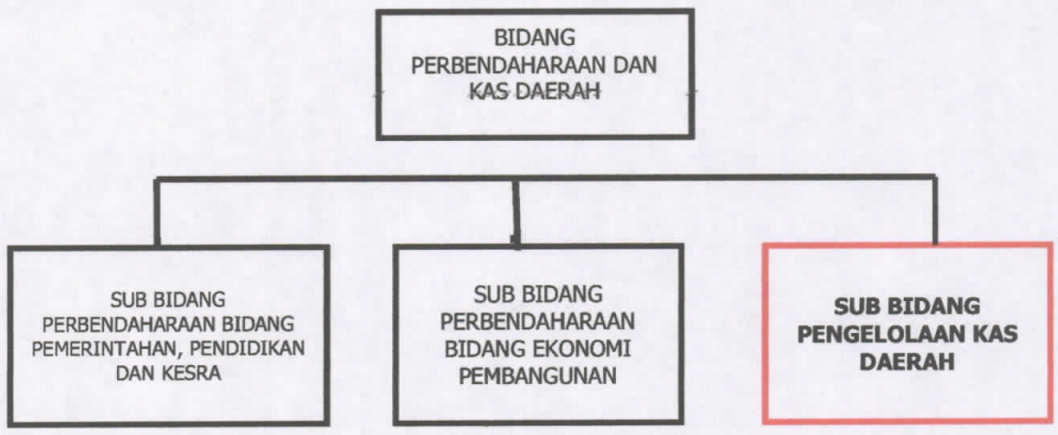
11) menyiapkan bahan penyajian data dan informasi perbendahaaan dan pengelolaan kas;

12) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengeloaan Kas Daerah;

13) melakukan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan.
   Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan:
   a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
   b) Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   c) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	76 % sampai 100%	Baik
2	56 % sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan	41 OPD	41	41	41	41	100 %

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dari 1 (satu) Kegiatan dengan 3 (tiga) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **"Baik".**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan	41 OPD	41 OPD	100%	559.767.000	552.543.000	98,71%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran *(cost per outcomes)* di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 98,71%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan artinya kinerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah adalah "**baik**" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.7.224.000,00 atau sebesar 1,29%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja.Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan setiap tahun.
2) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 98,71%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.7.224.000,00 atau sebesar 1,29%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang,

Mengetahui KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
RUDI NUGROHO,SE, MM Pembina Tingkat I NIP.19700524 199603 1 003	SRI SULASTRI, SE, MM Pembina NIP.19700519 199503 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA BIDANG ASET DAERAH

ADI RAHADJO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780716 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A Perjanjian Kinerja	7
B Capaian Kinerja	8
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	10
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12
B Rekomendasi	12
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Aset Daerah	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Bidang Aset Daerah
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaa, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.

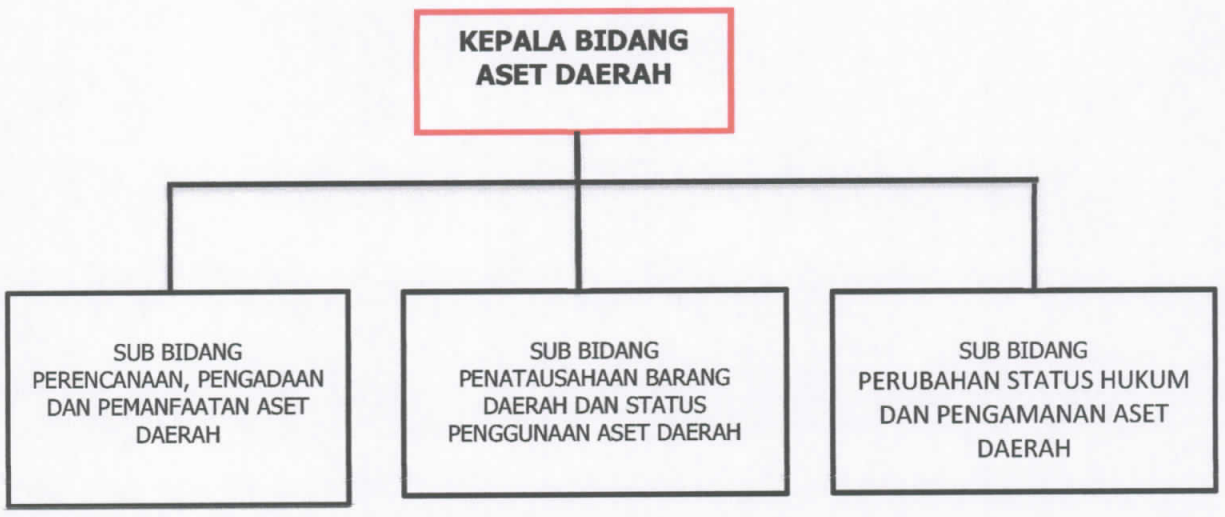
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah.
c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Aset Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

Susunan Bidang Aset Daerah Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

a. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
b. Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah ; dan
c. Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. **Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Aset Daerah.

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan asset. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
   b) Koordinasi dan Penyusunan rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah;
2) Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
   b) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
   c) Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan
   d) Konsolidasi Penyusunan laporan Barang Milik daerah dari SKPD;
3) Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; dan

b) Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian Atas Pemindahtanganan Barang Milk Daerah.

4) Jumlah Aset yang diamankan. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Bidang Aset Daerah

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan aset daerah	67,5%	70,23%	72,84%	72,84%	72,84%	107,91 %
							% capaian	**107,91 %**
1.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset	4	2	2	1	0	125 %
		Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD	43	43	43	43	43	100 %
		Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa	5	1	1	2	1	80%
		Jumlah Aset yang diamankan	41	41	41	41	41	100 %
							% capaian	**101,25%**

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa rata-rata capaian kinerja Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dari 1 program: Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan 1 kegiatan pendukungnya adalah 107,91% atau "Sangat Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan aset daerah	67,5%	72,84%	107,91 %	3.547.137.000	3.525.439.117	99,39%
				107,91 %	**3.547.137.000**	**3.525.439.117**	**99,39%**
Kegiatan 1.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset	4	5	125%	569.448.000	567.186.100	99,60%
	Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD	43	43	100%	806.651.000	803.573.000	99,62%
	Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa	5	4	80%	580.954.000	573.448.400	98,71%
	Jumlah Aset yang diamankan	41	41	100%	1.590.084.000	1.581.231.617	99,44%
				101,25%	**3.547.137.000**	**3.525.439.117**	**99,39%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.3.547.137.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.525.439.117,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.21.697.883,00 atau 0,61%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Bidang Aset Daerah sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;
2. Penerapan Dokumen RKBMD dan RKPBMD dalam rangka penguatan akuntabilitasn pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah;
3. Optimalisasi SIM ASET dalam mendukung penyusunan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inventarisasi BMD dalam rangka pengamanan asset pemerintah Provinsi Jawa Tengah baik secara *yuridis* melalui kebijakan sertifikasi, maupun secara fisik melalui label, patok dan pemagaran.

BAB III
PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari program tercapai 107,91 % dan indikator kinerja dari kegiatan tercapai 101,25%. Sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 99,39%, sehingga dapat dikategorikan **"Sangat Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.21.697.883,00 atau 0,61%.

B. **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan/Sub Kegiatan agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penguatan SIM ASET melalui optimalisasi modul perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan serta penatausahaan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian".

Semarang,

Mengetahui KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA BIDANG ASET DAERAH
SLAMET, Ak	ADI RAHADJO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I	Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198603 1 001	NIP. 19780716 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya, bahwa Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

Sub Bidang Perubahan Status Hukum
dan Pengamanan Aset Daerah

AGUS CAHYONO, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19670822 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A Perjanjian Kinerja	7
B Capaian Kinerja	8
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	10
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12
B Rekomendasi	12

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Bidang Aset Daerah
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.

Adapun tugas Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah, meliputi:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah;
b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perubahan status hukum dan pengamanan aset Daerah;
d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi perubahan status hukum dan pengamanan aset Daerah;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah;
f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah; dan
g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Aset Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. **Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tanggal

meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**, dengan indikator kinerja

   1.1 Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :

   a) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; dan

   b) Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian Atas Pemindahtanganan Barang Milk Daerah;

   1.2 Jumlah Aset yang diamankan. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah

B. **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa	5	1	1	2	1	80%
		Jumlah Aset yang diamankan	41	41	41	41	41	100 %
							% capaian	**90,00%**

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah dari 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) Sub kegiatan pendukungnya adalah 90,00% atau "Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa	5	4	80%	580.954.000	573.448.400	98,71%
	Jumlah Aset yang diamankan	41	41	100%	1.590.084.000	1.581.231.617	99,44%
				90,00%	**2.171.038.000**	**2.154.680.017**	**99,25%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.2.171.038.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.154.680.017,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.16.357.983,00 atau 0,75%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Melakukan identifikasi BMD yang belum memiliki dokumen riwayat kepemilikan (sertifikat) untuk dilakukan pengamanan yuridis (sertifikasi).

2. Melaksanakan *Updating* dan Pemberkasan data BMD yang akan disertifikatkan bersama SKPD terkait.
3. Menyusun *MoU* dengan kanwil dan Kantor Pertanahan Kab/Kota serta SKPD terkait dalam rangka percepatan proses sertifikasi.
4. Mendorong SKPD untuk melakukan pengawasan dan pengamanan BMD dalam penggunaannya.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari program tercapai 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,25%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.16.357.983,00 atau 0,75%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan/Sub Kegiatan agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan capai;
2. Melakukan identifikasi BMD yang belum memiliki dokumen riwayat kepemilikan (sertifikat) untuk dilakukan pengamanan yuridis (sertifikasi).
3. Melaksanakan *Updating* dan Pemberkasan data BMD yang akan disertifikatkan bersama SKPD terkait.
4. Menyusun MoU dengan kanwil dan Kantor Pertanahan Kab/Kota serta SKPD terkait dalam rangka percepatan proses sertifikasi.
5. Mendorong SKPD untuk melakukan pengawasan dan pengamanan BMD dalam penggunaannya.

Semarang,

Mengetahui	
KEPALA BIDANG ASET DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH
ADI RAHADJO, S.STP, M.Si	AGUS CAHYONO, SH, MH
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19780716 199703 1 001	NIP. 19670822 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya, bahwa Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

Kepala Sub Bidang Penatausahaan
Barang Daerah dan Status
Penggunaan Aset Daerah

KASIDI, SE
Penata (III/c)
NIP. 19680331 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A Perjanjian Kinerja	7
B Capaian Kinerja	8
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	10
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12
B Rekomendasi	12

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Bidang Aset Daerah
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah;
b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Bidang Penatausahaan dan Status Penggunaan Aset Daerah;
d. menyiapkan bahan pengendalian dan pemeliharaan sistem informasi aset Daerah;
e. menyiapkan bahan penggunaan dan penatausahaan aset Daerah;
f. menyiapkan bahan dan melakukan penyimpanan aset Daerah yang tidak digunakan;
g. menyiapkan bahan pengumpulan data inventaris barang, inventarisasi dan sensus barang milik Daerah;
h. menyiapkan bahan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah;
i. menyiapkan bahan pemutakhiran data sistem informasi barang milik Daerah;
j. menyiapkan bahan sistem penunjang menggunakan aplikasi Sim Aset;
k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah; dan

l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Aset Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. **Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**, dengan indikator kinerja Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD.

   Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :

   a) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
   b) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
   c) Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan
   d) Konsolidasi Penyusunan laporan Barang Milik daerah dari SKPD;

B. **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD	43	43	43	43	43	100 %

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah dari 1 (satu) kegiatan dengan 4 (empat) Sub kegiatan pendukungnya adalah 100,00% atau "Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD	43	43	100%	806.651.000	803.573.000	99,62%
				100%	**806.651.000**	**803.573.000**	**99,62%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.806.651.000,00 terealisasi sebesar Rp.803.573.000,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.3.078.000,00 atau 0,38%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Bidang Aset Daerah sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;

2. Bersama dengan Bidang Akuntansi untuk menyamakan persepsi dalam menyajikan Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan SIM ASET;
3. Mewujudkan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah valid dan akurat, yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Mewujudkan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tersistem dan terstruktur dengan baik;
5. Menyajikan data nilai aset yang akurat dan akuntabel dari setiap SKPD sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari program tercapai 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,62%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.3.078.000,00 atau 0,38%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan/Sub Kegiatan agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan capai;
2. Bersama dengan Bidang Akuntansi untuk menyamakan persepsi dalam menyajikan Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan SIM ASET;
3. Mewujudkan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah valid dan akurat, yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Mewujudkan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tersistem dan terstruktur dengan baik;
5. Menyajikan data nilai aset yang akurat dan akuntabel dari setiap SKPD sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan

6. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang,

Mengetahui	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH
KEPALA BIDANG ASET DAERAH	
ADI RAHADJO, S.STP, M.Si	KASIDI, SE
Pembina Tingkat I	Penata
NIP. 19780716 199703 1 001	NIP. 19680331 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya, bahwa Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

Kepala Sub Bidang Perencanaan
Pengadaan dan Pemanfaatan Aset
Daerah

IBNU PRABOWO, S.Sos, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19760430 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A Perjanjian Kinerja	7
B Capaian Kinerja	8
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	10
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12
B Rekomendasi	12

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Bidang Aset Daerah
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan aset Daerah;
e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
f. menyiapkan bahan penyuluhan pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
g. menyiapkan bahan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah/bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Aset Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. **Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tanggal
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**, dengan indikator kinerja Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan asset.

   Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :

   a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
   b) Koordinasi dan Penyusunan rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah;

B. **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.
Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah
BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset	4	2	2	1	0	125 %

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) Sub kegiatan pendukungnya adalah 125% atau "Sangat Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset	4	5	125%	569.448.000	567.186.100	99,60%
				125%	**569.448.000**	**567.186.100**	**99,60%**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.569.448.000,00 terealisasi sebesar Rp.567.186.100,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2.261.900,00 atau 0,40%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Bidang Aset Daerah sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;

2. Penerapan Dokumen RKBMD dan RKPBMD dalam rangka penguatan akuntabilitas pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah;
3. Promosi asset Provinsi Jawa Tengah terutama pada lingkup asset pengelola dalam rangka pemanfaatan/pemberdayaan Barang Milik Daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari program tercapai 125,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,60%, sehingga dapat dikategorikan **"Sangat Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.2.261.900,00 atau 0,40%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan/Sub Kegiatan agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penggunaan dokumen RKBMD dan RKPBMD dalam rangka perencanaan dan penganggaran APBD pada perangkat daerah.
3. Penyusunan dokumen pemberdayaan asset daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Daerah.

Semarang,

Mengetahui

KEPALA BIDANG ASET DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
ADI RAHADJO, S.STP, M.Si	IBNU PRABOWO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19780716 199703 1 001	NIP. 19760430 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UNIT PENGELOLAAN ASRAMA DONOHUDAN

Dra. DYAH SRIMARWATI, MH
Penata Tingkat I / (IIId)
NIP. 19660729 199403 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	8
A Perjanjian Kinerja	8
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	11
BAB III PENUTUP	13
A Kesimpulan	13
B Rekomendasi	13

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sub Bagian Tata Usaha UPAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan mempunyai tugas melaksanakan tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatatausahaan.

Adapun tugas Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan meliputi:

a) Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
b) Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
c) Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
d) Menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
e) Menyiapkan pengelolaan keuangan;
f) Menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
g) Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset
h) Menyiapkan kerjasama dan kehumasan
i) Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
j) Menyiapkan koordinasi penyususnan evaluasi dan pelaporan; dan
k) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudanpada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pengelolaan Asrama Donohudan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 32 Tahun 2018

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Tata Usaha UPAD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Administrasi Umum, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
5) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
6) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Lua Daerah;

7) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; dan
   b) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair; serta
9) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Tata Usaha UPAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bagian Tata Usaha UPAD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Tata Usaha UPAD

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.1	Administrasi Umum	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%

		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
							% capaian	**100,00%**

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa rata-rata capaian kinerja Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didukung dari 9 (tiga) Sub Kegiatan adalah 100,00% atau "Baik".

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah							
Kegiatan 1.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12	12	100%	0	0	0
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	12	100%	0	0	0
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	12	100%	0	0	0
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala	12	12	100%	0	0	0

	Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	12	100%	0	0	0
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	100%	0	0	0
	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12	12	100%	0	0	0
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	12	100%	0	0	0
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	12	100%	0	0	0
				100%	0	0	0

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;
2. Peningkatan kualitas pengelola keuangan (Bendahara) melalui keikutsertaan Bimtek/Workshop/Seminar bidang pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan ibadah Haji; dan
4. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari kegiatan tercapai 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 100,00%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPAD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Sub Bagian Tata Usaha UPAD sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;
2. Peningkatan kualitas pengelola keuangan (Bendahara) melalui keikutsertaan Bimtek/Worksho/Seminar bidang pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan ibadah Haji; dan
4. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

Semarang,

Mengetahui KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PENGELOLAAN ASRAMA DONOHUDAN
SLAMET, Ak Pembina Tingkat I NIP. 19660215 198603 1 001	Dra. DYAH SRIMARWATI, MH Penata Tingkat I / (IIId) NIP. 19660729 199403 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance),* mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes.*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategi 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA UNIT PENGELOLAAN
ASRAMA DONOHUDAN

BAMBANG SUMANTO, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19650429 199103 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	8
A Perjanjian Kinerja	8
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	11
BAB III PENUTUP	13
A Kesimpulan	13
B Rekomendasi	13
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Unit Pengelolaan Asrama Donohudan
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Unit Pengelolaan Asrama Donohudan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pengelolaan Asrama Donohudan.

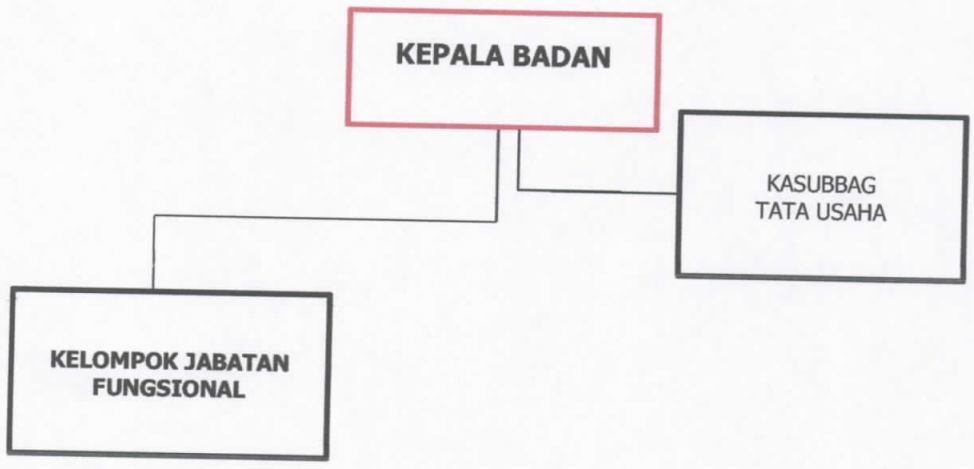
Adapun tugas Unit Pengelolaan Asrama Donohudan meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;
b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;
c. menyiapkan pemberdayaan dan optimalisasi aset asrama Donohudan melalui promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang pendapatan asli daerah;
d. menyiapkan pelayanan terhadap penyelenggaraan haji;
e. menyiapkan pengelolaan sarana prasarana asrama Donohudan;
f. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan asrama Donohudan;
g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan; dan
h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Unit Pengelolaan Asrama Donohudanpada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
pada Unit Pengelolaan Asrama Donohudan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 82 tahun 2016

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pengelolaan Asrama Donohudan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Administrasi Umum, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
5) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
6) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Lua Daerah;

7) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan :
   a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; dan
   b) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair; serta
9) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 56 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Unit Pengelolaan Asrama Donohudan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Unit Pengelolaan Asrama Donohudan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.1	Administrasi Umum	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%

		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	3	3	3	3	100%
							% capaian	**100,00%**

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa rata-rata capaian kinerja Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didukung dari 9 (sembilan) Sub Kegiatan adalah 100,00% atau **"Baik"**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Unit Pengelolaan Asrama Donohudanpada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah							
Kegiatan 1.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12	12	100%	1.800.000	1.788.000	99,33
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	12	100%	718.560.000	684.261.842	95,23
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	12	100%	1.055.397.000	1.007.223.314	95,44
	Jumlah bulan terpenuhinya	12	12	100%	103.811.000	100.199.300	96,52

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	12	100%	20.070.000	19.722.500	98,27
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	100%	30.518.000	29.003.000	95,04
	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12	12	100%	298.220.000	286.192.798	95,97
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	12	100%	550.000	528.000	96
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	12	100%	3.500.000	3.500.000	100
				100%	**2.232.426.000**	**2.132.418.754**	**95,52**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) indikator kegiatan pada Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.2.232.426.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.132.418.754,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.100.007.246,00 atau 4,48%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Unit Pengelolaan Asrama Donohudan sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;
2. Peningkatan kualitas pengelola keuangan (Bendahara) melalui keikutsertaan Bimtek/Worksho/Seminar bidang pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan ibadah Haji; dan
4. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik untuk indikator kinerja dari kegiatan tercapai 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 100,00%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** dan penyerapan anggaran terdapat efieiensi sebesar Rp.100.007.246,00 atau 4,48%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dokumen yang disusun Unit Pengelolaan Asrama Donohudan sehingga lebih optimal untuk dimanfaatkan sebagai evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat badan;
2. Peningkatan kualitas pengelola keuangan (Bendahara) melalui keikutsertaan Bimtek/Worksho/Seminar bidang pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan ibadah Haji; dan
4. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

Semarang,

Mengetahui KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA UNIT PENGELOLAAN ASRAMA DONOHUDAN
SLAMET, Ak	BAMBANG SUMANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19660215 198603 1 001	NIP. 19650429 199103 1 004